

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal Kerjasama Indonesia-Jerman untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami

Padang setelah gempa bumi |

06



Peran media dalam peringatan dini |

08



Pengkajian risiko |

09 /10



Produksi video baru |

11



- 02 | [Kerjasama Pembiayaan dari AusAID](#)
- 03 | [Berita dari Daerah Percontohan](#)
- 07 | [Info Terbaru IOWave09](#)
- 09 | [Lokakarya Risiko](#)
- 11 | [Kesadaran & Pendidikan](#)



Editorial

Gempa bumi baru-baru ini di Padang adalah berita yang mengguncang kita semua. Walau demikian, bencana itu bukanlah suatu kejutan. Gempa itu mendapatkan liputan media yang luas dan parahnya kerusakan dan korban jiwa telah kita semua ketahui. Kami ingin menyatakan simpati yang mendalam kepada rakyat Padang dan Pariaman. Untungnya, semua mitra proyek kami di Padang selamat, dan mereka kini terlibat dalam operasi darurat dan pemulihan.

Padang adalah kejadian terakhir dan terparah dalam serangkaian gempa bumi di dan di sekitar daerah percontohan kami dalam dua bulan ini. Tim kami menyaksikan gempa bumi 6,9 SR saat tiba di Pulau Sikuai, di lepas pantai Padang, tempat kami mengadakan temu tim semesteran pada pertengahan Agustus. Pada tanggal 2 September, peringatan tsunami untuk Jawa Barat diikuti oleh gempa 7,3 SR di dekat Tasikmalaya dan menghasilkan kasus nyata bagi Daerah Percontohan Jawa. Daerah Percontohan Bali mengalami gempa 6,4 di selatan Nusa Dua pada tanggal 19 September. Ribuan kilometer ke timur, tsunami menyapu Samoa, membunuh lebih dari 100 orang.

Setiap kejadian ini menyebabkan penderitaan dan kerusakan. Namun, kejadian seperti itu juga memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam pengembangan strategi kesiapsiagaan dan peringatan dini. Kami akan berupaya menghasilkan yang terbaik dari pelajaran yang diperoleh.

Salam,
Harald Spahn, Team Leader GTZ IS-GITEWS



Tim dan para mitra pada lokakarya di Sikuai dan Padang

Proyek Percontohan bagi Masyarakat Lokal akan segera memasuki tahap akhir. Berkat kerjasama pembiayaan dari AusAID, proyek mampu meningkatkan kegiatannya dalam prakarsa-prakarsa peningkatan kesadaran, penjangkauan masyarakat, dan kemitraan. Kompilasi semua keluaran yang relevan yang dihasilkan selama proyek juga masuk agenda kami, guna memastikan bahwa semua pengalaman berharga dapat digunakan untuk menautkan semakin banyak masyarakat ke InaTEWS.

Kerjasama pembiayaan AusAID untuk GITEWS

Paket kerja "Pembangunan Kapasitas Masyarakat Lokal" dari proyek Sistem Peringatan Dini Tsunami Jerman-Indonesia (GITEWS) telah menerima bantuan pendanaan dari AusAID sebesar 550.000 dolar Australia, untuk melengkapi kegiatan proyek yang sudah direncanakan. Tujuannya adalah meluaskan lingkup dan cakupan intervensi proyek.

Kerjasama pembiayaan ini juga memungkinkan dampak lebih luas pada tingkat masyarakat dan pemerintah daerah, serta dukungan yang menguat bagi badan-badan nasional. Masa implementasi adalah antara Juni 2009 dan Maret 2010. Sumbangan AusAID kepada kegiatan proyek GITEWS memungkinkan hasil-hasil tambahan di bidang-bidang intervensi berikut:

1. Kesadaran dan Penjangkauan Masyarakat
2. Pembangunan Kapasitas dan Penyediaan Rujukan bagi Layanan Peringatan
3. Perluasan Kemitraan Lokal dan Penguatan Pertukaran
4. Pengujian Sistem

Temu Tim Proyek

Sikuai & Padang, August 17–21, 2009

Temu ini diadakan untuk berbagi kemajuan dan proses di dalam dan di sekitar proyek. Temu juga menghasilkan rencana kerja yang dimutakhirkan bagi proses inti hingga Maret 2010.

Sesi pertama di Senin pagi membahas tema "Mengaitkan Daerah & Nasional", yang menyediakan pandangan menyeluruh proyek dan topik yang kami kerjakan.

Selama sesi kedua di hari Selasa dan Rabu, kami merevisi semua keluaran proyek dan membuat putusan akhir tentang cara mendokumentasikannya dalam **Tsunami Kit**. Tsunami Kit akan menjadi kompilasi semua alat yang relevan, manual, dan pengalaman yang dikembangkan selama masa proyek, dan akan memberikan hubungan ke prakarsa dan sumber daya yang terkait.

Sesi ketiga pada hari Kamis dikhususkan untuk **Daerah Percontohan**. Penasihat lokal menyediakan rencana kerja yang dimutakhirkan dan tim mengumpulkan gagasan bagi kegiatan untuk diimplementasikan dalam kerangka **Program Pertukaran** (pertukaran pengalaman di antara daerah percontohan, kabupaten bertetangga, kunjungan ke Pusat Peringatan Nasional, dan kerjasama antarkabupaten).

Setelah presentasi dari mitra Padang tentang kemajuan setempat, tim proyek dan konsultan yang diundang menghususkan sesi di Jumat untuk menentukan kegiatan yang akan dijalankan di dalam kerangka rencana kerja **Program Pertukaran** dan menetapkan prioritas bagi moderasi modul TOF.

Sebelum berangkat, kami melepas petang dengan para **mitra dari Daerah Percontohan Padang** di sebuah restoran hidangan laut yang bagus.



Tim "disambut" di Pulau Sikuai, di lepas pantai Padang, oleh gempa bumi 6,9 SR dekat Siberut/Mentawai dan mengalami beberapa kali gempa susulan di hari-hari berikutnya.

Informasi & Pertukaran Usulan untuk Lokakarya Nasional

Selama hampir empat tahun proyek pembangunan kapasitas (2006-2010), GTZ dan para mitra telah mengumpulkan sejumlah pengalaman menarik dan praktik terbaik serta panduan nasional bagi TEW, yang memberikan sumbangan bagi pembangunan kapasitas masyarakat lokal.

Berebekal gagasan dari **Departemen Dalam Negeri**, GTZ berencana mendukung mitra **RISTEK** sebagai koordinator saat ini bagi pembangunan InaTEWS, **BNPB** sebagai koordinator di masa depan, **BMKG** sebagai wadah Pusat Peringatan Tsunami, dan Departemen Dalam Negeri dalam menyebarkan panduan nasional melalui penyelenggaraan lokakarya dan acara informasi di TEWS.

Tujuan lokakarya adalah menyediakan para pemangku kepentingan lokal dari kabupaten dan provinsi rawan tsunami dan para pemangku kepentingan nasional sebuah ruang diskusi dan berbagi pengalaman terbaik, serta memperluas kemitraan lokal dan memperkuat pertukaran.

Peserta yang diharapkan adalah wakil-wakil dari pemerintah daerah, khususnya para pembuat kebijakan dan operator teknis (BPBD dan Pusdalops), wakil-wakil dari lembaga nasional yang terlibat dalam InaTEWS, dan wakil-wakil media.

Henny Dwi Vidiarina
Henny.Vidiarina@gtz.de



Peta Evakuasi Tanjung Bena / Penandatanganan Nota Kesepahaman di Tanjung Bena / Taklimat Gubernur di Pusdalops / Temu Koordinasi TEWS

Berita dari Daerah Percontohan

Bali

Dengan peresmian Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di Denpasar, Bali membuat satu lagi langkah ke arah penyedia layanan 24/7 bagi peringatan dini tsunami dan panduan di Bali. Karena Pusat ini akan dioperasikan oleh pemerintah pada tingkat provinsi, koordinasi yang baik dengan kabupaten-kabupaten di Bali menjadi keharusan.

Peluncuran Awal Pusdalops Bali

Pada tanggal 29 Agustus 2009, sebuah upacara untuk meresmikan Pusdalops yang baru diadakan di Denpasar.

Bangunan itu, didirikan dengan dukungan Palang Merah Prancis, diserahkan kepada Gubernur oleh BNPB. Wakil-wakil dari lembaga-lembaga nasional, RISTEK, Depdagri, LIPI, dan BMKG juga menghadiri acara ini.

Gubernur Bali mengatakan bahwa beliau berharap Pusdalops akan beroperasi penuh dalam jangka dekat.



Staf Pusdalops menjelaskan aneka fungsi pusdalops dan melakukan simulasi tabletop untuk menunjukkan cara kerja prosedur peringatan dini tsunami di Bali.

Bulan depan, kantor-kantor akan dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Berbarengan dengan itu, staf baru akan menerima pelatihan lebih lanjut agar siap menangani situasi darurat.

Temu Koordinasi TEW

Peresmian Pusdalops Bali diikuti oleh temu koordinasi antara wakil-wakil pemerintah provinsi dan kabupaten Bali untuk membahas pembagian peran dan koordinasi peringatan dini tsunami antara Pusdalops dan kabupaten rawan tsunami. Temu ini, dijabatani oleh GTZ IS, juga dihadiri wakil-wakil dari RISTEK, BNPB, Depdagri, BMKG dan LIPI.

Setelah penjelasan tentang rantai peringatan dini tsunami saat ini di Indonesia dan Bali, beberapa pertanyaan terbuka dibahas dan kesimpulan berikut ditarik:

1. Konfirmasi Pusdalops Bali sebagai penyedia resmi peringatan tsunami dan layanan panduan bagi Bali. Ini berarti bahwa Pusdalops itu memiliki mandat menyerukan evakuasi dalam kejadian ancaman tsunami.
2. Kesepakatan bahwa pengaturan kelembagaan di antara kedua tingkat harus ditangani.
3. Kesepakatan bahwa pada pertemuan berikutnya, pertanyaan terkait harus diperjelas: cara peringatan disampaikan ke kabupaten, kepada siapa, dan prosedur apa yang harus diikuti di tingkat kabupaten ketika peringatan atau panduan diterima dari Pusdalops.

Gede Sudiartha
gede_sudiartha@yahoo.com

Harald Spahn
harald.spahn@gtz.de

Nota Kesepahaman ditandatangani di Tanjung Bena:

Hotel akan memberikan naungan bagi masyarakat setempat selama kondisi darurat tsunami

Prakarsa yang didukung oleh BHA dan GITEWS berpusuk pada penyerahan resmi peta evakuasi dan penandatanganan nota kesepahaman antara wakil-wakil dari masyarakat dan hotel sekitar adalah sebuah contoh menarik kerjasama dalam pengurangan risiko bencana di antara sektor swasta dan negeri.

Rencana darurat yang dikembangkan bersama mempertimbangkan:

- Penetapan ruang evakuasi di hotel
- Pembentukan prosedur evakuasi
- Penetapan karyawan hotel dan wakil masyarakat dengan peran komunikasi dan koordinasi
- Pendidikan bagi orang-orang yang ditunjuk tentang tugas dan wewenang mereka
- Penyebaran kepada anggota masyarakat

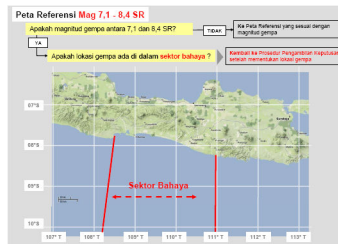
Melalui prakarsa ini, naungan bagi lebih dari 2.000 orang dari enam banjar telah dibuka di 6 hotel yang berpartisipasi.

Prosedur dan peta telah diterbitkan dalam brosur. Proses juga telah didokumentasikan dalam lembar fakta untuk berfungsi sebagai contoh bagi daerah wisata lainnya.

Langkah selanjutnya

Proyek akan membantu proses tindak lanjut untuk koordinasi antara provinsi dan kabupaten tentang prosedur peringatan dini. Dukungan lebih lanjut akan diberikan kepada proses perencanaan evakuasi di Kuta dan Sanur. Beberapa kegiatan dalam Program Pertukaran juga masuk agenda.

Info Gempa
 Mag:7.3 SR,
 02-Sep-09 14:55:00 WIB,
 Lok: 8.24LS-107.32BT
 (142Km barat daya
 TASIKMALAYA).
 Kedlmn: 30Km.
 Potensi TSUNAMI
 utk dtrskn pd msyrtk::



Jawa: Reaksi Masyarakat di Bantul terhadap Gempa Bumi Tasikmalaya 2 September 2009

Gempa bumi yang terjadi di bagian selatan Jawa Barat terasa kuat di daerah percontohan Jawa. Itulah uji coba yang sesungguhnya bagi masyarakat, khususnya di Bantul, tempat pusdalops 24/7 sederhana beroperasi saat ini. Pengeras suara/sirene serbaguna rakitan tersedia di sepanjang pantai dan di sebagian desa yang tersambung dengan pusat informasi dan mencakup beberapa masyarakat. Para penduduk memiliki pengetahuan dasar bahaya tsunami dan perencanaan respon. Teknologi dan prosedur komunikasi diuji coba dalam latihan tsunami yang diadakan di akhir 2008.

Setelah gempa pada tanggal 2 September, sambungan listrik, telepon, dan email, serta infrastruktur secara umum, di Bantul tidak terpengaruh. Jadi, bagaimanakah cara kerja mekanisme peringatan dan kesiapsiagaan yang ada selama gempa bumi? Di bawah adalah ringkasan wawancara dengan sebagian pemangku kepentingan di Bantul yang menggambarkan reaksi petugas dari lembaga resmi dan kelompok masyarakat.

	Reaksi Institusi Pemerintah	Reaksi Masyarakat	Butir Pembelajaran
Gempa 14:55	<ul style="list-style-type: none"> - Dua petugas jaga di Pusdalops tersentak ketika merasa tanah bergetar. - Komunikasi segera terjadi antara Pusat dan tim SAR lewat <i>handy talky</i> (HT), serta Kesbangpollinmas dan Sekretaris Daerah via ponsel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar 80% orang di daerah pesisir pergi keluar rumah, namun banyak yang di pantai tidak bergerak. Sebagian orang mencari informasi tentang gempa secara proaktif dari empat pos SAR di pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arus info dari BMKG ke Pusdalops Bantul terhambat oleh kurangnya ponsel khusus untuk itu dan sambungan internet yang bermasalah.
Info Gempa BMKG 15:00	<ul style="list-style-type: none"> - Pesan info gempa BMKG muncul di televisi di Pusdalops. Petugas memeriksa silang informasi dengan peta rujukan tsunami dan prosedur tanggapan di manual. - JARINGAN KOMUNIKASI yang terdiri atas tim SAR, BMKG Daerah, Palang Merah Indonesia, Angkatan Laut, dan Pusdalops Bantul serta Kebumen dimulai lewat HT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Empat pos SAR mulai berkomunikasi via HT pada frekuensi 162.55 MHz, dan sebagian petugas mengamati pantai terhadap tanda alam kenaikan air. - Anggota-anggota kelompok kerja, fasilitator lokal, dan tim SAR meneruskan info gempa yang diterima kepada para tetangga dan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pusdalops 24/7 memungkinkan pengambilan dan penyebaran putusan yang cepat kepada masyarakat. Peta rujukan dan manual dibaca. Pemerintah daerah terus dikabari dan dimintai pendapat. - Jaringan Komunikasi SAR dan Pusdalops Bantul dan Kebumen terhubung dengan baik.
Penyebaran Lokal 15:05	<ul style="list-style-type: none"> - Panduan PERINGATAN diterbitkan dan disebar oleh Pusdalops kepada masyarakat lewat pelantang suara di pantai dan di masjid-masjid. SIRENE TIDAK diaktifkan. - KESBANGPOLLINMAS menerima informasi gempa dari staf GTZ IS, yang lalu meneruskan kepada asisten dan wakil gubernur, serta sekretaris daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pesan PERINGATAN terdengar oleh banyak orang melalui pelantang suara di pantai dan masjid, namun yang lain tidak mendengar peringatan karena gangguan derau atau rusaknya alat. Pengguna HT perseorangan dapat mendengar komunikasi antara Pusdalops dan tim SAR. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dua pesan (Info Gempa dan Semua Aman) diterbitkan oleh BMKG lewat media umum.
Pesan Semua Aman 16:06:05	<ul style="list-style-type: none"> - Pesan SEMUA AMAN terlihat di televisi pada pusat operasi. Petugas menyebarkan sekali lagi pesan kepada masyarakat melalui pelantang suara, dan kepada Jaringan Komunikasi SAR lewat HT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Orang-orang mendengar pesan SEMUA AMAN yang diumumkan Pusdalops melalui pengeras suara di sekitar mereka. Yang lain mendengar pesan di komunikasi HT. Mereka kembali ke kegiatan harian normal. - SAR di Bantul memastikan bahwa tidak ada tanda alam kenaikan air yang teramati di pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua pengeras suara yang dipasang di masyarakat bekerja dengan baik—sebagian tidak berfungsi. - Sementara sebagian besar orang keluar rumah, yang lain tetap di pantai. Fasilitator, kelompok kerja dan anggota SAR lokal memainkan peran dalam penyebaran lebih lanjut peringatan dan pesan kepada para tetangga.

Benny Usdianto
benny.usdianto@gtz.de



Peresmian Pusdalops / Rapat Roundtable



Padang

Artikel ini ditulis sebelum gempa bumi menghantam Padang pada tanggal 30 September 2009. Anda dapat menemukan berita situasi terbaru di halaman berikutnya.

Masalah-masalah utama selama triwulan terakhir adalah masalah kelembagaan untuk mengimplementasikan peringatan dini tsunami di Padang, yang mencakup pembagian peran di antara pemerintah provinsi dan kota, serta pembentukan dasar hukum daerah untuk menerapkan InaTEWS.

Peresmian Pusdalops Padang

Pada tanggal 13 Agustus 2009, pemerintah Padang yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Bpk. Mahyeldi meresmikan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pusdalops. Peresmian juga dihadiri oleh dewan pembuat kebijakan lokal (Muspida) dan lembaga kesiapsiagaan bencana di Padang yang ingin mendapatkan informasi langsung tentang fasilitas baru ini serta peralatannya.

Dalam pidatonya, Wakil Wali Kota mengatakan bahwa pemerintah Padang menitipkan kepada kantor penanggulangan bencana tanggung jawab yang besar, dan berharap lembaga yang terkait lainnya untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan kantor itu.

Selagi menyimulasikan skenario gempa bumi, Pusdalops menunjukkan caranya berfungsi sebagai penyedia peringatan dini bagi rakyat di Padang. Versi draf SOP TEW dipaparkan kepada Muspida Padang. SOP itu mencakup delegasi kewenangan dari wali kota kepada pusat operasi darurat untuk menyerukan evakuasi masyarakat.

Wakil wali kota memberikan tanggapan positif terhadap draf SOP TEW, dan memerintahkan kantor penanggulangan bencana agar segera memaparkan draf itu kepada Wali Kota. Lalu, draf itu akan dirampungkan dan disahkan dalam bentuk keputusan wali kota.

Rapat Roundtable

Rapat roundtable yang diprakarsai oleh BGR-GITEWS dan diwadahi oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Juli 2009 di Hotel Pangeran, Padang, memberikan jawaban atas beberapa masalah kunci yang terkait dengan peran dan tanggungjawab pemerintah provinsi dan kota.

Para pembuat kebijakan bagi penanggulangan bencana yang membahas dan memperjelas koordinasi kelembagaan dengan mempertimbangkan pengalaman dan sudut pandang dari daerah-daerah lain.



Keluaran kunci dalam rapat ini adalah bahwa para peserta menyepakati perlunya SOP yang menyeluruh dan terpadu bagi Peringatan Dini Tsunami, yang harus diterapkan oleh pemerintah kota/kabupaten.

Juga disepakati bahwa semua kota dan kabupaten yang mampu menerapkan TEWS 24/7 diizinkan untuk menyerukan evakuasi. Bagi kota/kabupaten yang belum mampu, wewenang menyerukan evakuasi terletak pada pemerintah provinsi.

Willy Wicaksono
willy.wicaksono@gtz.de

Kabar Terakhir tentang versi draf Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Peringatan Dini Tsunami

Versi draf SK Wali Kota tentang Peringatan Dini Tsunami sedang mengalami revisi kelima. Sebagian perubahan penting sedang dibuat pada struktur SK dan menunggu masukan dari tingkat nasional menyangkut skema peringatan baru.

Beberapa revisi penting terhadap draf SK mencakup:

(1) delegasi kewenangan dari wali kota kepada pusat operasi darurat untuk menyediakan layanan TEW kepada masyarakat.

(2) cara lembaga-lembaga terkait dapat mendukung TEW, yang mencakup kewajiban dan mekanisme bagi lembaga penyiaran atau media untuk menyebarkan informasi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat.

SOP TEW akan didokumentasikan sebagai lampiran keputusan, sehingga revisi apa pun terhadap SOP akan dibuat tanpa harus merevisi dasar hukumnya.

Kegiatan Selanjutnya di Padang

Kegiatan yang direncanakan sebelumnya kini sedang direvisi dan akan diubah atau disesuaikan sejalan dengan perkembangan situasi di Padang selepas gempa bumi.



Kota menderita kerusakan parah / Pusdalops dan RRI memainkan peran penting dalam memberitahu masyarakat bahwa tidak ada ancaman tsunami

Setelah gempa bumi: Kabar terbaru tentang daerah percontohan Padang

Padang, 30 September 2009 – laporan dar Penasihat GTZ Willy Wicaksono

"Gempa bumi 7,6 mengguncang Sumatera Barat pada 30 September, pukul 17.16. Pusat gempa dekat dengan Padang – salah satu daerah percontohan GITEWS bagi InaTEWS. Getaran terasa sangat kuat dan cepat. Banyak orang tidak dapat berdiri atau bahkan keluar dari gedung.

Setelah tanah berhenti bergoyang, kami melihat banyak orang berlari keluar dari gedung dengan panik. Banyak gedung rubuh, kebakaran menggelora di beberapa daerah di Padang. Listrik terputus, dan jaringan seluler, termasuk GSM, juga mati. Banyak orang mengungsi atas prakarsa sendiri, mengarah ke jalan antarkota, dengan kendaraan dan menyebabkan kemacetan yang tak terhindarkan.

Pusdalops Padang yang baru diresmikan rusak berat, namun dapat meneruskan operasinya dengan listrik cadangan dari UPS dan generator. Telepon kabel masih beroperasi dan dapat menyediakan sambungan internet untuk menerima informasi dari BMKG.

Informasi BMKG diterima oleh pusat operasi darurat kira-kira 10 menit setelah gempa bumi, lewat sambungan internet. Informasi menunjukkan bahwa tidak ada ancaman tsunami setelah gempa bumi. Pusdalops menggunakan radio dua arah (VHF) untuk memberitahu masyarakat dan lembaga bahwa tidak ada ancaman tsunami dan bahwa orang-orang boleh menghentikan pengungsian. Peralatan komunikasi lainnya seperti sirene tidak digunakan karena tidak ada ancaman tsunami.

Sekalipun ada pengumuman oleh Pusdalops tentang tidak adanya tsunami, orang-orang masih terus mengungsi. Kira-kira satu jam setelah gempa bumi, Wali Kota Padang, berdasarkan laporan dari Pusdalops,

mengumumkan kepada masyarakat lewat RRI bahwa tidak ada ancaman tsunami dan meminta masyarakat tetap tenang.

Kemacetan lalu lintas terurai sekitar pukul 21.00 dan tenda-tenda digelar di larut malam dan hujan rintik. Tim SAR bekerja dengan peralatan amat minim untuk menarik orang-orang dari reruntuhan.

Willy Wicaksono
willy.wicaksono@gtz.de

Padang, 30 September 2009 – kesimpulan pertama tentang InaTEWS

Tampaknya, SOP Padang bekerja: orang-orang memulai evakuasi diri setelah getaran kuat, mencoba meninggalkan daerah pantai. Pusat operasi darurat menerima informasi gempa bumi BMKG dan meneruskannya ke para pengambil putusan daerah. Masyarakat diberitahu bahwa tidak ada ancaman tsunami dan evakuasi tidak diperlukan.

Yang terjadi di Padang menegaskan asumsi semula: seperti diduga, jaringan listrik dan seluler langsung mati. Pesan teks tidak dapat dikirim dan komunikasi ke masyarakat mustahil dilakukan selama jam pertama. Pengalaman ini juga menegaskan andalnya jaringan radio VHF dan pentingnya radio FM untuk terus memberikan informasi.

Pengalaman di Padang sekali lagi menegaskan pentingnya peringatan "negatif". Pengumuman "tidak ada ancaman tsunami" penting dalam situasi seperti itu. Pusdalops tampaknya telah membuktikan bahwa teknologi komunikasi sekalipun harus redundan; dengan sistem cadangan yang tangguh dan staf terlatih, penerimaan dan penyebaran peringatan dini dapat dilakukan, bahkan dalam kondisi ekstrem.

Bagaimana selanjutnya?

Padang memiliki tugas besar yang menanti: upaya pemulihan dan rekonstruksi akan memerlukan banyak waktu dan sumber daya.

Sayangnya, kita harus berasumsi bahwa ancaman gempa bumi besar dan tsunami masih ada. Ilmuwan meramalkan dari analisis parameter gempa bumi bahwa gempa terakhir tidak mengurangi tekanan di zona subduksi. Karena itu, para mitra kami di Padang sedang didesak untuk melanjutkan kegiatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Tugas lain adalah merelokasi Pusdalops dan memperkuatnya untuk operasi lanjutan.

Rekonstruksi harus dijalankan dari sudut pandang membangun kembali lebih baik. Untuk Padang, inilah peluang untuk membangun ulang dengan bangunan tahan gempa dan tsunami, yang di daerah rawan tsunami dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi vertikal. Rute evakuasi juga harus juga diperbaiki.

Untuk perencanaan yang matang, kita memerlukan peta bahaya tsunami yang resmi. Bahan-bahannya sudah ada -- kini terserah kepada kelompok ilmiah untuk memberikan proposal yang solid.

Pengalaman 30 September memberi kami dengan banyak pelajaran berharga untuk meningkatkan peringatan dini tsunami di Padang. Kami akan menandai ini dan melihat lebih dalam yang terjadi di "Zona Merah", cara orang bereaksi, mana yang berjalan, dan mana yang tidak.

Kami akan memberitahu Anda perkembangannya.

Harald Spahn
harald.spahn@gtz.de



Ibu Sri Woro (Kepala BMKG) membuka lokakarya / Kunjungan ke Pusat Krisis BNPB / Foto bersama para peserta

Kabar Terbaru IOWave09 dan Panduan Rantai Peringatan

Bersama lembaga mitra nasional dan daerah, proyek berperan serta dalam Simulasi IOWave 2009 (IOWave09), dan penyusunan draf Panduan Rantai Peringatan Tsunami Nasional. Setelah laporan awal kami dalam edisi yang lalu, berikut kabar terbaru situasinya.

Info Terbaru IOWave09

Sebagian besar kegiatan yang terkait dengan persiapan IOWave09 telah rampung.

Pengembangan SOP lokal untuk Aceh berlangsung dari tanggal 13 hingga 16 Juli 2009, menghasilkan draf matang SOP Peringatan Tsunami dan Tanggap Darurat lokal bagi Provinsi Aceh. Draft divalidasi pada tanggal 18-19 Agustus 2009 di Banda Aceh. Ini diikuti dengan kegiatan penyebaran satu hari di Banda Aceh. Tujuan validasi adalah:

- Memvalidasi SOP terpadu bagi peringatan dini dan respon sejalan dengan skema peringatan BMKG
- Memutuskan frekuensi radio yang akan digunakan dalam komunikasi penanggulangan bencana
- Mengesahkan teks dan suara sirene standar
- Mengembangkan lebih lanjut rencana aksi IOWave

Untuk melibatkan media di dalam latihan, sebuah rapat pemimpin redaksi diadakan pada tanggal 31 Juli 2009 di BMKG. Wakil-wakil pimpinan media yang menghadiri rapat menerima informasi tentang IOWave09. BMKG pada khususnya, dan lembaga-lembaga lain di dalam InaTEWS pada umumnya, diajak mengunjungi dan terlibat dalam dialog langsung dengan staf di ruang editorial media, karena merekalah orang-orang yang memutuskan hal-hal yang diudarkan dan yang tidak.

Pada tanggal 10-14 Agustus 2009, empat lokakarya (Rapat RTT, Lokakarya SOP, Lokakarya WG6, dan Lokakarya Media) diadakan bersamaan di Hotel Le Meridien, Jakarta. Sementara sebagian lokakarya diadakan khusus untuk peserta nasional, peserta undangan lainnya datang dari negara-negara Samudera India. Lokakarya ini meliputi kunjungan ke Pusat Peringatan BMKG dan Pusat Krisis BNPB. Pada hari terakhir, simulasi tabletop bagi peserta internasional dan nasional diadakan. Simulasi kelompok media khususnya menarik karena mereka membuat setiap orang merasakan detak jam dalam kejadian peringatan. Media juga memberikan saran-saran tentang cara memperbaiki kaitan media ke masyarakat dalam hal ancaman tsunami.

Pada tanggal 14 September 2009, simulasi tabletop dilakukan oleh BMKG, BNPB, dan Pusdalops Aceh. Penyebaran peringatan dan pengambilan putusan diuji selama acara itu. Latihan IOWave09 internasional akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober.

Erma Maghfiroh
Erma.Maghfiroh@gtz.de

Info Terbaru Panduan Rantai Peringatan Dini Tsunami Nasional

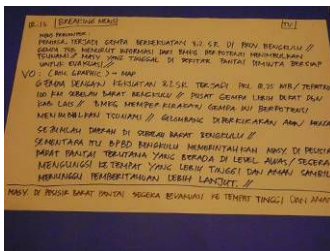
Diskusi Panduan Peringatan Tsunami Nasional selama Rapat Roundtable ke-4 para pemangku kepentingan InaTEWS menekankan pentingnya dokumen rujukan nasional yang memperjelas peran, tanggungjawab, dan mandat para pelaku yang terlibat dalam rantai peringatan tsunami dan InaTEWS. Dokumen itu menjelaskan pesan dan tingkat peringatan yang diterbitkan BMKG dan urutannya selama ancaman tsunami terjadi. Selama acara, para peserta sepakat tentang perlunya melanjutkan penulisan draf panduan nasional yang akan memperkuat kewenangan daerah dan kapasitas masyarakat untuk mengautkan dirinya dengan InaTEWS dan menyediakan rujukan bagi semua pemangku kepentingan lainnya, di antaranya media dan lembaga di semua tingkat.

Sebagai hasil rapat roundtable, satu tim dibentuk untuk menulis draf Panduan Rantai Peringatan Tsunami Nasional, yang terdiri atas wakil-wakil dari BNPB, LIPI, DKP dan BMKG. GTZ memberikan masukan dari pengalaman percontohannya dan mendukung fasilitasi dengan seorang konsultan yang akan menyusun masukan dan menyelenggarakan rapat. Empat rapat informal tim ini menghasilkan garis besar panduan rantai peringatan dan draf (kasar) pertama, yang mencakup pemutakhiran penting oleh BMKG tentang skema dan pesan peringatan.

Namun, tim menyimpulkan bahwa sebetulnya payung formal diperlukan untuk memberikan tim mandat yang jelas. Sementara sebagaimana isi telah dirinci dan pertanyaan utama telah dibahas, saat ini tim sedang menunggu Surat Keputusan (SK) dari BNPB sebagai badan yang akan memimpin di masa datang komponen hilir InaTEWS yang akan menerbitkan panduan itu pada akhirnya. SK itu akan menjadi dasar bagi diskusi mendalam di antara para anggota tim, yang juga diikuti oleh GTZ. Pelajaran penting dari latihan IOWave09 juga akan dimasukkan.

Begitu draf lengkap pertama panduan tersedia, tim penulis akan menyajikan dan membahas hasilnya di dalam forum pemangku kepentingan InaTEWS.

Michael W. Hoppe
michael.hoppe@gtz.de



Diskusi yang dipimpin Bpk Fidel (LIPI) selama lokakarya dengan media / "Berita Terkini Tsunami" selama simulasi tabletop IOWave09 di Hotel Le Meridien

Media Sebagai Salah Satu Pelaku Utama Dalam Penyebaran Peringatan Tsunami

Media memainkan peran bukan hanya melaporkan bencana, namun juga membantu mengurangi akibat bencana bagi masyarakat di daerah berisiko. Stasiun televisi dan radio dapat memberitahu masyarakat tentang ancaman tsunami dalam waktu singkat. Media menerima peringatan dari BMKG. Untuk mengirimkan pesan langsung ke masyarakat, SOP yang jelas diperlukan, bersama isi pesan yang juga jelas.

Media (televisi, radio, dan media cetak) bekerja keras untuk melaporkan bencana. Setelah setiap bencana besar di Indonesia, berita penuh dengan laporan tentang korban dan informasi latar tentang cara dan alasan bencana terjadi. Tidak ada keraguan tentang pentingnya peran media dalam melaporkan bencana alam (serta akibat manusia).

Sesungguhnya, peran media tidak terbatas pada pelaporan bencana. Dalam sistem peringatan tsunami, stasiun radio dan televisi memegang kedudukan penting sebagai salah satu lembaga antarmuka yang menyebarkan peringatan dari BMKG kepada umum – dan juga kepada masyarakat di sepanjang pesisir yang terancam tsunami. Stasiun radio dan televisi membuka sambungan langsung antara Pusat Peringatan Tsunami Nasional BMKG dan masyarakat umum.

Sistem peringatan ini menghubungkan 11 stasiun televisi dan 1 stasiun radio ke BMKG. Hubungan ini memungkinkan stasiun-stasiun itu menerima pesan peringatan tsunami langsung dari BMKG. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 20/2006 mengatakan bahwa stasiun radio dan televisi wajib menyela acara mereka untuk menyiarkan peringatan tsunami. Interupsi ini melibatkan alarm nyaring selama 30 detik yang dirancang untuk menarik perhatian pemirsa dan pendengar. Pada saat yang sama, pesan peringatan ditayangkan.

Didukung oleh LIPI, UNESCO, InWent, dan GTZ, sebuah lokakarya dengan wakil-wakil media untuk membahas

peran media dalam penyebaran peringatan diselenggarakan di Hotel Le Meridien pada tanggal 12-14 Agustus. Lokakarya ini, yang diadakan sebagai bagian latihan IOWave09, memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk membahas isi pesan yang disebar oleh media. Lokakarya tiga hari ini juga menemukan bahwa tiap media memiliki SOP-nya sendiri untuk menyiarkan peringatan. Beberapa dapat mengudarakan peringatan dalam lima menit setelah menerima peringatan, sementara yang lain memerlukan lebih dari 10 menit.



Pembahasan peran media akan dilanjutkan: alih pengetahuan kepada personel media mengenai sistem peringatan secara menyeluruh (peralatan dan pelaku, serta skema peringatan) diperlukan untuk membuat media dapat mengisi perannya dalam InTEWS. SOP harus diubah dan format serta isi pesan dari BMKG kepada media harus disesuaikan dengan keperluan masyarakat umum. Dari sudut pandang media, pesan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar: Di mana? Apa? Mengapa? Siapa? Kapan? Dan bagaimana? (5 W dan 1 H).

Harapan Media

Untuk menjalankan peran dalam menyebarkan peringatan, media berharap sejumlah dukungan. Mereka mengharapkan format pesan yang lebih mudah "dipahami" dan penghubung di BMKG yang tersedia untuk diwawancarai. "Mudah dipahami" artinya bahwa pesan itu dapat langsung dimengerti dan bersifat instruktif kepada masyarakat, karena tiada waktu bagi media untuk menafsirkan. Pesan dari BMKG akan sekadar dibacakan dan ditayangkan. Karena itu, pesan diharapkan sejelas mungkin. Media juga berharap bahwa BMKG menunjuk seorang petugas jaga yang dapat dihubungi ketika pesan diterbitkan untuk mengecek ulang dan memperjelas informasi seperlunya. Ini juga mengurangi potensi salah informasi.

Di sisinya, media diharapkan berperan lebih dalam kesiapsiagaan dan pendidikan masyarakat. Kesiapsiagaan dalam makna mengetahui yang harus dilakukan sebelum tsunami terjadi, dan pendidikan masyarakat khususnya menyangkut pesan pembatalan dan alasan terbitnya. Masyarakat harus memahami bahwa ketidakpastian adalah bagian yang melekat dalam sistem peringatan tsunami. Harus ada jalan tengah antara keperluan bagi penyebaran peringatan yang tepat waktu dan kepastian. Karena tujuan utama adalah menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami, media dapat memainkan peran dalam mendidik masyarakat tentang cara menghadapi tsunami.

Erma Maghfiroh
Erma.Maghfiroh@gtz.de

Daftar Stasiun Televisi dan Radio yang tersambung ke BMKG

- | | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 1. ANTV | 5. Metro TV | 9. Trans7 |
| 2. Global TV | 6. RCTI | 10. TVRI |
| 3. Indosiar | 7. SCTV | 11. TRansTV |
| 4. TVOne | 8. TPI | 12. RRI |



Lokakarya dan Peserta Pelatihan di Padang dan Bali



Lokakarya dan Pelatihan Teknis tentang Pengkajian Risiko Tsunami di Daerah Percontohan GITEWS Padang dan Bali

Selama 21-31 Juli 2009, kelompok kerja gabungan Indonesia-Jerman untuk pemodelan risiko dan pengkajian kerentanan, dipimpin oleh LIPI dan DLR di bawah payung RISTEK dan BMBF, melanjutkan pembahasan tentang implementasi produk Pengkajian Risiko Tsunami selama dua lokakarya di daerah percontohan Padang dan Bali. Lokakarya diikuti oleh pelatihan teknis untuk memberdayakan staf teknis agar memahami dan dapat melakukan pengkajian risiko tsunami.

Lokakarya tentang pengkajian risiko tsunami di Bali dan Padang mewakili kegiatan bersama LIPI, DKP, GTZ-IS, InWent, UNU-EHS dan DLR yang melibatkan para mitra lokal sehingga mendudukkan bersama para pengambil putusan dan ilmuwan di bidang penanggulangan bencana yang terkait.

Tujuan utama lokakarya adalah menyediakan ikhtisar hasil pengkajian risiko untuk disampaikan kepada para pengambil putusan di daerah dan merencanakan langkah-langkah berikutnya yang terkait dengan kemungkinan implementasi dan penerapan hasil pengkajian risiko untuk mendukung kegiatan perencanaan daerah.



Tema utama yang disajikan dan dibahas mencakup:

- Hasil dan implikasi pengkajian risiko tsunami di tingkat lokal (daerah percontohan)
- Implementasi kelembagaan produk risiko
- Proses pengesahan (draft panduan)
- Penggunaan dan penafsiran hasil pengkajian risiko bagi pengurangan risiko bencana

Produk pengkajian risiko bagi daerah percontohan memberikan informasi yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan rencana kesiapsiagaan spesifik bagi masyarakat. Metodologi dan alat yang dikembangkan diterjemahkan

menjadi draft panduan untuk memperkuat implementasi di daerah percontohan dan membangun produk pengkajian risiko bagi pengurangan risiko bencana.

Pelatihan teknis diselenggarakan di Padang dan Bali oleh DKP dan DLR sebagai jawaban atas pesimisme umum terhadap solusi peringatan dini "canggih" dan untuk mengaitkan produk pengkajian risiko dengan kebutuhan masyarakat. Pelatihan ini mengungkapkan manfaat produk dan memberdayakan staf teknis pemerintah daerah untuk menggunakan, menafsirkan, dan memutakhirkan hasil-hasil pengkajian risiko.

Muatan pelatihan didasarkan pada pengalaman pelatihan pertama tentang pemodelan evakuasi, yang diadakan di Denpasar di bulan Juni.



Keluaran utama pelatihan adalah:

- Metodologi di balik produk peta dipahami dan diterima
- Peserta diberdayakan untuk menghasilkan kembali produk tertentu pengkajian risiko.

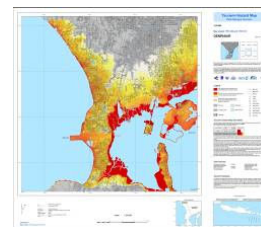
Herryal Z. Anwar (LIPI) herranw@yahoo.co.id;

Abdul Muhari (DKP) aam@dkp.go.id;

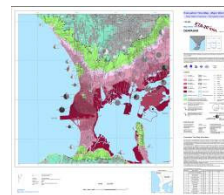
Joachim Post (DLR) joachim.post@dlr.de

Produk pengkajian risiko tsunami yang disajikan dan dibahas

Informasi risiko yang terinci untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mendukung kebutuhan perencanaan khusus setempat (misalnya, evakuasi, perencanaan darurat) disediakan untuk daerah percontohan Padang dan Bali (lihat juga artikel dari UNU dalam edisi kali ini).



Peta Bahaya Tsunami



Peta Waktu Evakuasi



Peta Perencanaan Bangunan Evakuasi Tsunami

Penerapan produk risiko dalam konteks penanggulangan bencana lokal dibahas secara intensif selama lokakarya dan pentingnya informasi risiko seperti itu ditekankan oleh para peserta dan pejabat nasional dan lokal yang terkait.

Langkah berikutnya dalam pemodelan risiko dan pengkajian kerentanan

- Lokakarya & pelatihan teknis tentang pengkajian risiko tsunami untuk Cilacap direncanakan di November 2009
- Dukungan lanjutan bagi implementasi produk pengkajian risiko tsunami
- Sumbangsih bagi panduan BNPB untuk pengembangan produk dan metodologi pengkajian risiko tsunami yang disusun oleh kelompok kerja gabungan



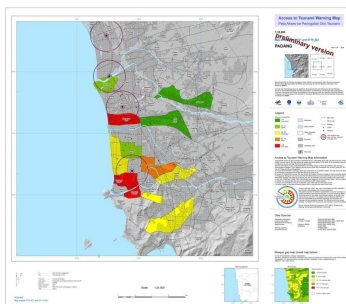
Diskusi tentang hasil kajian kerentanan dan akibatnya bagi pengelolaan risiko bersama pejabat-pejabat daerah dan nasional serta wakil-wakil dari LSM (PMI, Kogami)

Kerentanan dan pengkajian risiko daerah sebagai alat penting bagi tata kelola peringatan hulu ke hilir

Efisiensi sistem peringatan dini tsunami sangat bergantung pada kemampuan masyarakat berisiko menemukan tempat yang aman pada waktunya. Mengingat Taksiran Waktu Tiba (ETA) Tsunami dalam 30 menit setelah terjadinya gempa bumi tsunamigenik dan bahwa setidaknya 10 menit Waktu Putusan Kelembagaan dan Pengumuman, masyarakat berisiko tidak memiliki banyak waktu tersisa untuk menyelamatkan diri. Maka, fokus pengkajian kerentanan (yang diadakan oleh DLR/UNU-EHS dan LIPI) didasarkan pada faktor-faktor yang membahayakan evakuasi tepat waktu: Tidak layaknya akses ke peringatan, kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan untuk mengungsi (LIPI/UNU-EHS), dan kurangnya kemampuan melakukan evakuasi

Akses ke peringatan tsunami: Akses yang kurang ke peringatan dini berdampak pada keterlambatan dalam penyebaran peringatan dan dapat mengantar kepada hilangnya nyawa selama peristiwa tsunami. Peta di bawah menunjukkan pola ruang akses yang dapat mengantarkan kepada rumah tangga ke peringatan yang disebarkan melalui alat yang disebutkan di bawah. Dengan informasi ini, para pemangku kepentingan daerah dapat merancang strategi penyebaran peringatan dini yang berpusat masyarakat dan efisien. Tiga jenis media akses peringatan bagi rumah tangga dikenali:

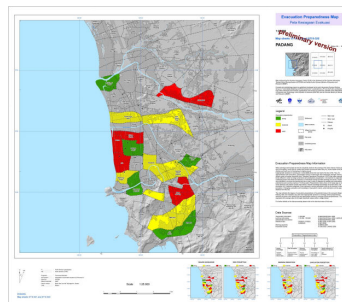
- Akses rumah tangga ke peringatan lewat layanan media swasta (televisi, seluler, radio)
- Akses rumah tangga ke sirene, misalnya yang saat ini dipasang di kota Padang.
- Akses rumah tangga ke pelantang suara mesjid (peta kecil kanan bawah).



Hasil-hasil menunjukkan bahwa untuk kasus kota Padang, masih banyak yang harus dikerjakan untuk membuat peringatan yang tepat waktu efisien. Khususnya, diperlukan cakupan sirene dengan kepadatan yang lebih tinggi. Kesenjangan ini memerlukan pengembangan solusi berbasis komunitas.

Kesiapsiagaan Evakuasi: Ketika peringatan mencapai masyarakat berisiko, tidak setiap orang bereaksi terhadap peringatan dengan cara yang seragam. Reaksi yang tidak tepat merupakan faktor kerentanan yang dapat mengantarkan kepada hilangnya nyawa. Maka, bagi penduduk yang harus diungsikan secara tepat waktu (pengembangan SOP tingkat rumah tangga), para pengambil keputusan harus terus meningkatkan kesadaran di kalanganarganya.

Untuk merancang program kesadaran dan pemasyarakatan, memahami faktor-faktor yang mendasari yang membentuk perilaku perseorangan selama dan setelah peringatan diterbitkan itu penting. Faktor yang teridentifikasi di Kota Padang adalah: Pengetahuan Perkiraan Waktu Kedatangan, Penilaian Subjektif terhadap Kerentanan, Kepercayaan terhadap Peringatan, Kemampuan Manajemen Evakuasi, Pengetahuan mengenai Rute Evakuasi, dan usia.

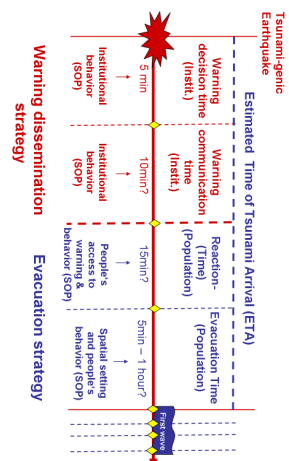


Pemetaan faktor-faktor dan nilainya bagi berbagai entitas geografis dapat mendukung rancangan strategi pemekaan (sensitisasi) khusus bagi masyarakat dan membuka debat umum tentang pentingnya kegiatan kesadaran berpusat masyarakat demi peringatan dini yang efektif.

Niklas Gebert (UNU-EHS)
gebert@ehs.unu.edu

Alasan Riset

“Pengkajian risiko dan kerentanan adalah alat penting bagi komunikasi risiko, dan mengembangkan peringatan tsunami serta mekanisme tanggapan yang efisien dan tepat waktu (pengelolaan risiko berpusat masyarakat di dalam konteks peringatan dini)”



Riset telah dilakukan di Padang, Cilacap, dan Bali dalam GITEWS-WP 4200: Pengkajian Risiko dan Kerentanan di bawah kepemimpinan umum DLR dan LIPI serta kolaborasi Kelompok Kerja GITEWS untuk Pengkajian Risiko dan Kerentanan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang proses, metodologi, atau hasil riset, hubungi penulis dan/atau:

Herryal Anwar (LIPI)
herranw@yahoo.co.id
 dan/atau:

Joachim Post (DLR)
joachim.post@dlr.de



Adekan dari film "Budi Jadi Sunatan" / Masyarakat yang hidup di daerah pantai adalah kelompok sasaran langsung

Untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi yang relevan, dan menggerakkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami di Indonesia guna mengembangkan dan memperbaiki strategi kesiapsiagaan mereka terhadap tsunami lokal, GTZ-IS GITEWS dengan bantuan AusAID telah membuat video bagi penjangkauan masyarakat dan paket informasi bagi pengambil keputusan di daerah.

'Budi Jadi Sunatan'

Sebuah film tentang Peringatan Dini Tsunami

MPH AANG, (dengan berwibawa), "Tujuh hari dari sekarang, rumah-rumah akan diratakan gelombang. Perahu-perahu akan musnah." ... Ketakutan mencekam... Orang-orang mulai panik... Situasi tak terkendali.

... Budi, Tiyo, dan Daru berjalan tak tentu, dengan wajah murung.

DARU, "Jika tsunami datang, memangnya kenapa?". **BUDI** mengangkat bahu, menggoyangkan kepalanya dengan sedih. **TIYO** (putus asa), "Filmnya bisa dibatalkan,....". **BUDI**, "Tidak bisa! **TIYO**, "Maksudmu apa? Tentu saja dibatalkan. Kamu jadi disunat minggu ini kan?"

... Air muka **BUDI** tampak makin keruh. Tiba-tiba dia menyentak, "Oh tidak! Pak Bejo!" **DARU**, "Apa?". **BUDI**, "Mantri sunat. Bagaimana kalau beliau ikut mengungsi?... Ayo kita cari dia!" **Budi dan Daru bergegas...**

Ramalan seorang dukun menjadi pembuka film 30 menit ini, dirancang untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi dasar, dan menggerakkan mereka yang tinggal di daerah rawan tsunami untuk mengembangkan strategi kesiapsiagaan tsunami mereka.

Kelompok sasaran adalah masyarakat berisiko, perseorangan, dan organisasi daerah di tingkat desa di daerah rawan tsunami Sumatera, Jawa, dan Bali.

Film ini adalah campuran antara pendidikan dan hiburan ("edutainment"). Bersama rumah produksi JIWA, proyek ini mengembangkan konsep dan gagasan kreatif dengan menerjemahkan topik teknis yang sangat rumit menjadi bentuk yang sangat mudah dimengerti, dengan menyederhanakan bahasa dan menyajikan gagasan dalam cerita pendek sederhana tentang Budi dan desanya.

'Paket Informasi' bagi Pengambil keputusan di Daerah

Saat banyak yang harus disampaikan namun waktunya singkat, sebuah pendekatan khusus diperlukan guna mendapatkan perhatian pengambil putusan dan menyampaikan pesan.

Paket informasi yang menyeluruh yang mencakup klip video lima menit bagi pengambil putusan setempat sedang dikembangkan guna memperkuat pemahaman mereka tentang bahaya tsunami dan sistem peringatan dini.



Paket ini berisi video pendek dan brosur yang memberikan informasi dasar tentang bahaya tsunami dan sistem peringatan dini, untuk meningkatkan kesadaran tentang peran pemerintah daerah dalam InaTEWS.

Kelompok sasaran adalah pengambil putusan di tingkat daerah, staf eksekutif tingkat tinggi, dan anggota DPRD, karena merekalah orang-orang yang membuat putusan tentang kesiapsiagaan tsunami di dalam peraturan dan anggaran daerah.

Henny Dwi Vidiarina
Henny.Vidiarina@gtz.de

Cuplikan Video

"Bayangkan... gempa bumi terjadi di daerah Anda... Apakah yang Anda lakukan? Bagaimanakah Anda bereaksi? ... Bagaimana jika gempa bumi terjadi di laut? ... Akankah ada tsunami? ... Ketika kita berbicara, gelombang tsunami mungkin sudah mulai menyapu ke arah pantai... Apakah penduduk di daerah Anda tahu yang harus dilakukan, apakah mereka siap menghadapi yang terburuk ...?"

"Jam terus berdetak! Apakah penduduk Anda sadar bahwa tsunami mungkin sedang mengintai ...?"

"Waktu habis! Kini saatnya membuat putusan... siapakah Anda?"

Inilah cuplikan dari naskah video lima menit yang menargetkan pengambil putusan dan kebijakan daerah terpilih. Film ini membahas perlunya peringatan dini dan kesiapsiagaan tsunami untuk melindungi warga mereka, dan menggerakkan mereka agar memimpin dalam meningkatkan semangat kesiapsiagaan dan perencanaan tsunami di masa datang dan membuat putusan tentang evakuasi saat gempa bumi dan peringatan datang dari BMKG. Video ini juga melihat siapa lagi yang berkewajiban menyiapkan dan melindungi penduduk.



Waktunya tiba! Kini saatnya membuat putusan... siapakah Anda?

Dukung Kami

Program Pertukaran dan Dialog Agustus 2009-Februari 2010



Kharisma Nugroho kharisma_nugroho@yahoo.com.sg memiliki lebih dari 14 pengalaman di dalam perancangan dan implementasi sistem M&E. Sebagai mantan kepala Unit M&E Aksi Stop AIDS (USAID), Kharisma meraih kecakapan dari Program Pendidikan Dasar (AusAID). Ia adalah wakil bagi Sektor Kedaruratan dan Rehabilitasi Cordaid (Belanda) di Indonesia, dengan pengelolaan dan pengembangan DRR menjadi tugas utamanya. Kharisma gemar menulis dan bermain domino.



Retno Winahyu Satyarini rwinahyu@gmail.com lulus sebagai ahli perencana kota. Ia pernah bekerja di berbagai proyek pembangunan, di bidang-bidang seperti pengentasan kemiskinan, agrohutani, pengembangan komunitas, dan penanggulangan bencana. Pernah menjadi peneliti untuk UGM dan ICRAF (International Centre for Agroforestry Research) serta koordinator program untuk OXFAM, Retno baru-baru ini bekerja untuk UNDP sebagai ketua tim dan konsultan. Selama enam tahun terakhir, ia terlibat aktif dalam DRR dan pemulihan pasca bencana.

Program Penjangkauan Masyarakat Agustus 2009-Februari 2010



Novalinda (Linda) novalinda@gfiagendi.com belatar pendidikan dan profesional. Selain penugasan dengan GTZ, ia juga seorang konsultan bagi Proyek Pengembangan Kelembagaan bagi Penyediaan Air Bersih Berbasis Komunitas dan Pengkajian Lingkungan Strategis. Berinteraksi dengan anak-anak adalah favorit Linda. Bersama **PREMANet Indonesia**, ia kini mendukung GTZ-IS GITEWS bersama Handa (di bawah).



Handayani Abdullah (Handa) handa.premanetindo@gmail.com adalah konsultan koordinator bagi Program Lingkungan Hidup (ProLH) GTZ. Kecakapannya yang mumpuni adalah dalam pendidikan partisipatif. Ia telah memberikan lebih dari 750 jam pengajaran dalam penyediaan air berbasis komunitas, efisiensi energi, dan berbagai jenis kerja fasilitasi. Handa selalu senang menghadapi tantangan baru.



Jenik Andreas (Jenik) ds.jenik@gtz.de memulai karir di proyek GITEWS sebagai Asisten Proyek di Daerah Percontohan Jawa. Kini ia menjadi Penasihat bagi Program Penjangkauan Masyarakat, mendukung strategi dan proses menyeluruh, serta memastikan bahwa konsep dan muatan teknis yang relevan dengan sistem peringatan dini dan penanggulangan bencana tsunami dimasukkan ke dalam modul pelatihan.

Perancangan dan pengembangan Paket Informasi & Tsunami Kit



Adriani S Soemantri (Ani), kalbu_jernih@yahoo.com, berpengalaman sebagai konsultan, fasilitator, peneliti, dan penulis independen selama 30 tahun; visinya adalah mengilhami orang-orang untuk kehidupan dan kesadaran yang lebih baik. Masalah-masalah sosial termasuk di antara keprihatinannya. Bakatnya dan cita rasa seninya dipahami olehnya sebagai sekedar kemampuan berpikir 'di luar kotak' atau 'berbeda dengan umum'. Perusahaannya, **MAKATA**, mendukung GTZ-IS GITEWS untuk mengembangkan Tsunami Kit.

Asisten Proyek untuk GITEWS Daerah Percontohan Jawa



Johanes Juliasman (Joel), johanes.juliasman@gtz.de bekerja untuk JRS di Tapaktuan, Aceh Selatan (2008), sebagai fasilitator pemetaan bagi desa-desa rawan kekeringan di Yogyakarta dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Universitas Atma Jaya (2009). Bidang minat dan kompetensinya adalah teknologi informasi.

Kontak:

GTZ - International Services
Menara BCA, 46th floor
Jl. M.H Thamrin No. 1
Jakarta 10310 - Indonesia

Telp: +62 21 2358 7571
Faks: +62 21 2358 7570
harald.spahn@gtz.de
www.gitews.org
www.gtz.de